

Era digital telah memicu transformasi besar dalam pola komunikasi dan partisipasi masyarakat, terutama melalui kemunculan *clicktivism*—partisipasi simbolik berbasis media sosial yang memanfaatkan fitur *like*, *comment*, dan *share* untuk menanggapi isu publik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam memengaruhi agenda setting kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana *clicktivism* berevolusi sebagai bentuk partisipasi digital dan sejauh mana interaksi publik melalui media sosial dapat memengaruhi kebijakan, khususnya dalam kasus viral kerusakan jalan di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi terhadap unggahan di platform X, TikTok, dan Instagram, serta wawancara mendalam dengan perwakilan dari Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung, serta jurnalis lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *clicktivism* mampu menciptakan tekanan publik yang signifikan terhadap pemerintah. Dalam kasus Lampung, viralnya kritik melalui media sosial memicu perhatian nasional dan mendorong respons cepat dari Presiden dan kementerian terkait dalam meninjau dan memperbaiki infrastruktur. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun *clicktivism* sering dianggap sebagai bentuk aktivisme yang dangkal atau temporer, pada konteks tertentu ia mampu menjadi katalisator perubahan kebijakan. Namun, untuk menjadikannya lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan integrasi dengan mekanisme partisipasi publik yang lebih formal dan terstruktur.

Kata Kunci: Klinktivisme, Media Sosial, Agenda Setting, Partisipasi Digital, Lampung

ABSTRACT

The digital era has sparked a major transformation in communication patterns and public participation, especially through the emergence of clicktivism—symbolic participation based on social media, utilizing features like, comment, and share to respond to public issues. This phenomenon raises questions about its effectiveness in influencing the public policy agenda. This research aims to understand how clicktivism has evolved as a form of digital participation and to what extent public interaction through social media can influence policy, particularly in the case of the viral road damage issue in Lampung Province. The study adopts a qualitative approach with content analysis methods on posts from platforms like X, TikTok, and Instagram, as well as in-depth interviews with representatives from Bappeda of Lampung Province, the Department of Public Works and Spatial Planning (BMBK) of Lampung, and local journalists. The findings show that clicktivism was able to create significant public pressure on the government. In the case of Lampung, the viral criticism on social media attracted national attention and prompted a quick response from the President and related ministries to review and fix the infrastructure. The conclusion of this study emphasizes that although clicktivism is often seen as a shallow or temporary form of activism, in certain contexts, it can serve as a catalyst for policy change. However, to make it more effective and sustainable, integration with more formal and structured public participation mechanisms is necessary.

Keywords: Clicktivism, Social Media, Agenda Setting, Digital Participation, Lampung